FAKSIONALISASI DAN KONFLIK INTERNAL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

¹Rizkyansyah, ²Ari Ganjar Herdiansah, ³Djayadi Hanan

^{1,2,3}Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Padjadjaran

rizkyansyah18001@mail.unpad.ac.id, ariganjar@gmail.com, jayadi72@gmail.com

Bandung-Indonesia

Abstract

This paper aims to examine and understand the form of factionalisation and Internal Conflict of Partai Persatuan Pembangunan (PPP) in people's perception of its existence as a political party. The method uses a qualitative approach with data and information obtained through interviews and library research methods. The data and arguments built in this paper use qualitative studies, namely by gathering various scientific references and from primary and secondary sources through searching for writings related to books, journals, papers, newspapers, magazines and direct interview results with informants related to problem in this study. The results showed that the internal PPP conflict was caused by differences in the views of political elite in determining the coalition carrying the presidential candidates. This happened in the PPP in 2014 when there were differences in the nominations between Suryadharma Ali and Romahurmuziy. The conflict then led to the dualism of the leadership of the Suryadharma Ali and Romahurmuziy camps. Another factor driving conflict is the different backgrounds of cadres in the political parties. Therefore, conflict management absolutely needs a political party.

Keywords: internal conflict; factionalism; United Party Development (Partai Persatuan Pembangunan)

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami bentuk faksionalisasi dan Konflik Internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam persepsi masyarakat atas eksistensinya sebagai partai politik.

Metode menggunakan pendekatan kualitatif dengan data dan informasi diperoleh melalui metode wawancara dan studi kepustakaan (library research). Data dan argumentasi yang dibangun dalam tulisan ini menggunakan studi kualitatif, yakni dengan mengumpulkan berbagai referensi ilmiah dan dari sumber primer dan sekunder melalui penelusuran tulisan terkait buku, jurnal, paper, surat kabar, majalah dan hasil wawancara langsung dengan informan yang ada hubungannya dengan masalah dalam kajian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik internal PPP disebabkan faktor perbedaan pandangan elit parpol dalam menentukan koalisi mengukung capres. Hal tersebut terjadi pada PPP tahun 2014 ketika terjadi perbedaan pencapresan antara Suryadharma Ali dengan Romahurmuziy. Konflik kemudian berujung pada dualisme kepemimpinan kubu Suryadharma Ali dan Romahurmuziy. Faktor lain yang mendorong terjadinya konflik adalah perbedaan latar belakang kader yang ada di dalam parpol. Oleh sebab itu, manajemen konflik mutlak diperlukan sebuah parpol.

Kata Kunci: Faksionalisme; Konflik internal; Partai Persatuan Pembangunan

Open Access at: <http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Partai Politik (Parpol) pada dasarnya digerakan oleh semangat faksi (Heller, 2008). Faksi, atau yang dikenal juga dengan intra-partai, memberikan pengaruh terhadap identitas, bentuk struktur organisasi, dan proses pembuatan keputusan internal partai (Harmel and Tan 2003). Faksi biasanya terdiri dari anggota-anggota partai yang memiliki preferensi dan tujuan utama yang sama dengan tujuan partai, namun, memiliki bukan berarti benar-benar identik atau sama dengan anggota-anggota partai lainnya, tentu masing-masing anggota memiliki tujuan tersendiri. Sehingga, satu partai bisa terdiri dari sub-grup atau intra-partai yang mungkin memiliki nuansa kepentingan yang berbeda tetapi teridentifikasi dalam satu label yang dinamakan partai (Ceron, 2016).

Beberapa kajian mengenai faksi yang telah ada saat ini memberikan gagasan yang sangat penting mengenai makna, latar belakang, dari faksi dan faksionalisasi. Kajian ilmiah mengenai faksi dikembangkan di sekitar tahun 1960-1970an oleh Zariski (1960), Rose (1964), Sartori (2008), dan Belloni dan Beller (1978). Faksi menjadi istilah yang umum digunakan banyak institusi politik. Merujuk pada definisi yang disampaikan oleh Beller, Belloni, Rose dan Zariski, faksi diartikan sebagai kelompok intra-partai, yang anggotanya memiliki identitas dan tujuan yang sama, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan faksi sangat beragam, termasuk: mempertahankan patronase dan kontrol faksi atas partai, mempengaruhi strategi dan kebijakan partai, serta mengusulkan serangkaian nilai baru kepada partai.

Selain tujuan, juga terdapat lima hal yang menjadi penyebab faksi: *pertama*, terbentuknya faksi karena adanya kesamaan atribusi nilai dan ideologi antar anggota partai yang dapat mendorong terbentuknya faksi untuk memperjuangkan nilai dan ideologi tertentu di dalam partainya. *Kedua*, kompleksitas sosiologis anggota partai, misalnya, faksi berdasarkan struktur kelas, ideologi, usia, pendidikan, dan lainnya. *Ketiga*, faksi dapat terbentuk akibat sistem politik, yakni sistem kepartaian dan sistem pemilu. *Keempat*, struktur organisasi partai, seperti contoh dalam hal desentralisasi struktur organisasi partai berdampak pada semakin kuatnya tendensi partai untuk terpecah-pecah, dan *kelima*, kepemimpinan elite menjadi alasan mengapa faksi terjadi, faksi di dalam partai dibentuk untuk digunakan pemimpin faksi, atau elite tertentu, untuk mengorganisasi dan memobilisasi kader partai politik dengan tujuan memperoleh dukungan atas kepemimpinan politiknya (Zariski, 1960).

Faksi bukan sebagai entitas yang statis, maka, istilah faksionalisasi diartikan lebih lanjut sebagai proses yang dinamis dan dapat bertransformasi secara berulang sebagai respon atas insentif yang diperolehnya. Faksionalisasi memiliki tiga bentuk, yakni: kooperatif, kompetitif, dan degenaratif. (Boucek, 2012). Apabila terjadi kompetisi antarfaksi di dalam partai (faksionalisasi kompetitif), dampaknya dapat terjadi konflik. Sesuai dengan teori Hine

bahwa, konflik internal partai melekat dengan kemunculan faksi dalam partai. Dengan kata lain, konflik tidak akan terbentuk bila tidak didahului oleh keberadaan faksi di dalam partai. Hine melihat bahwa ketidaksepahaman atas strategi, kebijakan dan ideologi yang dimiliki oleh pemimpin dan kader pengikutnya yang bergabung di dalam faksi yang berbeda dapat menciptakan konflik internal (Hine, 1982). Namun, perlu diingat kembali merujuk pada teori Boucek, maka hanya faksionalisasi yang terkategori kompetitif dan degenatif yang mengarah kepada konflik partai.

Pada dasarnya faksionalisasi merupakan wajah karakter dari parpol, faksionalisasi dan konflik internal dapat dikatakan sebagai suatu yang alamiah dan bahkan melekat dalam dinamika internal parpol itu sendiri. Hanya saja persoalannya adalah apakah faksionalisasi parpol berujung pada konflik internal dapat menjadikan perpecahan atau tidak. Perlu disadari bahwa, jika terdapat parpol yang berkonflik hingga menjadikan perpecahan, akan menjadi sebuah kerugian bagi parpol tersebut karena akan kehilangan eksistensinya pada sistem politik dan sistem pemilu hingga berujung pada pembubaran parpol tersebut. Inilah alasan penting mengapa harus melihat faksionalisasi pada parpol, dikarenakan hampir semua parpol mengalami konflik internal yang disebabkan faksi didalamnya, tidak terkecuali dengan parpol Islam.

Selain dipicu oleh perbedaan kepentingan, pandangan posisi politik, kultur dan karakter politik para anggota dan elite partai, faksionalisasi juga bisa terbentuk dari sejarah kelahiran parpol itu sendiri. Artinya, sejak lahir atau dilahirkan, faksionalisasi sudah terbentuk di dalam partai, hal ini menjadi menarik untuk dikaji, misalnya yang terjadi pada PPP yang pembentukannya dilakukan atas dasar penggabungan atau fusi parpol Islam sebelumnya yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI), Partai Syarekat Islam Indonesia (PSII), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI). Fusi di dalam PPP ini biasa disebut sebagai unsur, penggabungan kembali unsur NU dan Masyumi (pada perkembangannya bertransformasi menjadi Parmusi) kerap mengalami perseteruan yang mengingatkan kembali pada era orde lama, sebagai contoh konflik antara, Suryadharma Ali (SDA) selaku Ketua Umum (Ketum) PPP dari unsur NU dan Bachtiar Chamsah Selaku Ketua Majelis Petimbangan Partai (MPP) dari Parmusi. Bermula ketika Bachtiar membuat pernyataan bahwa kader Parmusi bebas memilih parpol manapun di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2009. Sebagai kader dan tokoh, pernyataan semacam ini terasa tidak elok, seperti menjerumuskan parpol pada kekalahan pemilu (Nurdin, 2019).

Dalam pencalegan di Pemilu 2009, konflik antara Ketum PPP SDA dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Irgan Chairul Mahfiz juga terjadi dikarenakan dalam penyusunan daftar Calon Legislatif (Caleg) yang disusun oleh SDA, tidak memiliki peluang untuk memenangi Pileg, sehingga Irgan tidak menandatangani berkas pencalegan itu. Tindakan

inipun berujung pada pemecatan Irgan sebagai Sekjen PPP (Nurdin 2019). Ternyata, hal yang hampir serupa juga terjadi pada pasca Pemilu 2014, terjadi konflik internal yang mengemuka di PPP, yang sempat membuat internal partai terbelah menjadi dua kubu, yaitu kubu Suryadharma Ali Ketum PPP yang didukung oleh Djan Faridz, Fernita Darwis, Epyardi dan Dimyati Natakusuma dan kubu Romahurmuziy (Rommy), Sekjen PPP yang didukung Emron Pangkapi, Suharso Monoarfa, Lukman Hakim Saefuddin, dan Reni Marlinawati.

Konflik ini diawali dengan dukungan PPP kepada pasangan Prabowo-Hatta di Pilpres 2014, Langkah politis SDA dengan hadir di kampanye Gerindra, membuat perbedaan pandangan dalam internal partai. Karena keputusan dukungan terhadap calon Presiden dalam Pilpres 2014 belum sepenuhnya bulat di internal PPP. Puncak perseteruan konflik ini berujung pada dualisme kepemimpinan dengan digelar dua muktamar, yakni Muktamar Surabaya yang memilih Romahurmuziy sebagai ketua umum dan muktamar pihak Suryadharma Ali di Jakarta yang menetapkan Djan Faridz sebagai ketua umum (Noor, 2016).

Konflik yang berlanjut pada aksi saling pecat antarpengurus, masing-masing pihak mengklaim dirinya paling sah dalam mengambil keputusan. Pada suatu kesempatan SDA melakukan pemecatan terhadap Rommy. Pada saat yang sama pengurus DPP PPP menggelar rapat harian yang merekomendasikan agar dilakukan rapat pimpinan nasional. Rapimnas itu pun merekomendasikan pemberhentian SDA dan menunjuk Emron Pangkapi (yang saat itu menjadi Wakil Ketua Umum) sebagai Plt Ketua Umum. Sistem pemilu terbuka secara nyata memberi sumbangan terhadap terjadinya konflik internal parpol Islam. Setiap menjelang pemilu parpol Islam tidak luput dari kompetisi internal yang bukan menjadi pemicu untuk melangkah lebih baik, tetapi malah justru membuatnya lemah.

Peristiwa sepihak yang dilakukan oleh SDA hingga terdapatnya dualisme kepemimpinan saat itu, mengakibatkan pada pemilu 2019, elektabilitas suara PPP menurun hingga pada titik ambang batas parlementer. Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, sedikit banyaknya konflik internal PPP berimbas dan mempengaruhi perolehan suara dalam setiap pemilu dari tahun 1999-2019, perolehan jumlah suara dan jumlah kursi PPP mengalami penurunan yang sangat signifikan. Konflik ini menegaskan bahwa terdapat faksi yang jelas dari beberapa unsur yang membentuk satu fusi di dalam tubuh PPP serta, perbedaan pandangan elit parpol ini menyebabkan konflik aliran dari kedua unsur tersebut (Romli 2017). Berdasarkan faktor pendorong lahirnya konflik internal di PPP terdapat klasifikasi konflik yaitu; konflik yang lahir akibat adanya perbedaan kepentingan politik, dan konflik yang lahir akibat perbedaan latar belakang kader. Dalam kontek kepartaian hai ini adalah sebuah kebenaran karena kecenderungan partai adalah faksi, bukan fusi (Nurdin, 2019).

TINJAUAN LITERATUR

Faksi Intra-Partai

Kajian Ilmiah mengenai faksi dikembangkan di sekitar tahun 1960-1970an oleh Zariski (1960), Rose (1964), Sartori (1976), dan Belloni dan Beller (1978). Faksi menjadi istilah yang umum digunakan untuk banyak institusi politik, jika merujuk pada definisi yang disampaikan, maka dapat ditarik dua elemen yang penting dari faksi, yakni: (1) subkelompok yang menjadi bagian dari kelompok yang lebih besar, dan (2) subkelompok dipersatukan oleh identitas dan tujuan yang sama. Frank P. Belloni dan Dennis C. Beller berargumen bahwa faksi adalah kelompok terorganisir yang berada dalam kelompok besar. Kelompok ini bersaing dengan kelompok lainnya guna memperoleh kekuasaan. (Beller, D.C., & Belloni 1978). Rose dalam Kim Eric Bettcher mengungkapkan bahwa faksi adalah: sekelompok individu yang berusaha untuk memperluas berbagai kebijakan melalui aktivitas politik yang diorganisir secara (Rose, 1964).

Ditetapkan istilah "faksi" kelompok dengan karakteristik yang sangat berbeda. Dalam kebanyakan kasus, konteks dan ruang lingkup penelitian sebagian besar mempengaruhi definisi dari faksionalisme. Faksi sebagai kombinasi atau pengelompokan pemilih dan pemimpin politik yang bersatu di waktu tertentu dalam mendukung calon. Selanjutnya, definisi dari faksi cenderung dikaitkan dengan identifikasi kekuatan organisasi. Sebuah analisis rinci dari faksionalisme partai dipelopori oleh Raphael Zariski dan itu adalah analisis konseptual pertama yang menawarkan hipotesis untuk menjelaskan politik faksi menggunakan kerangka komperatif. Zariski mengembangkan berbagai pendekatan untuk menganalisis kelompok intra-partai dilabel sebagai faksi dari fungsi struktur dan dampak kelompok politik tersebut. Zariski mendefinisikan faksi sebagai: setiap intra-partai kombinasi, atau pengelompokan yang anggotanya berbagai rasa identitas umum dan tujuan umum dan diatur untuk bertindak secara kolektif sebagai blok yang berbeda dalam partai untuk mencapai tujuan mereka (Zariski, 1960).

Pemahaman zariski tentang faksi jelas menyiratkan tingkat daya tahan tertentu dari organisasi. Dia menunjukkan kebutuhan untuk faksi memiliki identitas umum dan menjadi terorganisir secara kolektif. Kecenderungan ini mengilhami definisi ini lebih berlaku untuk negara-negara dengan sistem politik yang lebih mapan dan pihak yang dilembagakan. Penafsiran sempit tentang faksi diperkenalkan oleh Nathan yang cenderung mengasosiasikan faksi dengan ikatan patron-klien terlepas dari tingkat organisasi. Menggambar dari analisis pengelompokan dalam Partai Komunis China, faksi menurut Nathan dapat dianggap sebagai "jaringan pribadi pemimpin individu yang beroperasi pada dasar hubungan klientelis untuk tujuan politik mereka". Meskipun masalah organisasi, sarjana lain telah mencoba untuk fokus pada dasar kelompok yang terbagi.

Perdebatan lain yang berkaitan dengan aspek-aspek motivasi dan faksi partai adalah apakah faksi dasarnya kelompok ideologis. Pembahasan mengenai faktor ideologis di faksi formasi dasarnya berasal dari gagasan bahwa faksi mungkin memiliki berbagai tujuan, kepentingan daerah atau kelompok, pengaruh pada strategi partai dan dari pemerintah, dan promosi seperangkat nilai diskrit. Dalam banyak kasus, ideologi faksionalisme menjadi aspek penting dalam pembentukan identitas partai. Ideologi konflik mencerminkan perbedaan pendapat tentang nilai yang ditegakkan. Magone menyatakan bahwa kontroversi ideologi sering didasarkan pada desain politik untuk organisasi internal partai dan sistem politik di masa depan. Beller dan Belloni hati-hati menentukan faksi sebagai: setiap kelompok yang relative teroganisir dan yang bersaing dengan rival kekuasaan keuntungan dalam kelompok yang lebih besar dari yang merupakan bagian.

Faksi juga dapat diartikan sebagai koalisi individu yang direkrut secara pribadi oleh seorang pemimpin yang memiliki ikatan dengan pengikat yang biasanya bersifat pribadi, meskipun kadang merekrut orang lain atas nama pemimpin mereka. Anggota direkrut sesuai dengan prinsip-prinsip terstruktur secara structural. Dalam konteks partai politik faksi intra-partai adalah sekelompok yang bersaing dengan kelompok lain untuk memperoleh keunggulan power di dalam partai politik (Rose, 1964)

Pembagian faksi terjadi dalam banyak partai di Indonesia. Tapi umumnya faksi tersebut bersifat cair dan didasarkan pada loyalitas klien juga besarnya peluang terhadap patronase daripada representasi pembelahan sosial dan persaingan paradigm ideologis. Ulla Fiona dan Dirk Tomsa membagi tiga faktor utama yang kemudian menjadi pola khas faksi yang lazim terjadi di Indonesia. Pertama, yaitu struktur pembelahan sosial yang masih menonjol dan dipolitisasi. Kedua, budaya partronase yang masih mengakar kuat yang merupakan warisan dari rezim otoriter pada era sebelumnya. Ketiga, kelembagaan atau aturan-aturan yang mendasari sistem partai seperti peraturan mengenai pendirian partai politik, sistem pemilihan umum, dan lain-lain (Tomsa, 2008).

METODOLOGI

Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data dan informasi diperoleh melalui metode wawancara dan studi kepustakaan (*library research*). Data-data serta argumentasi yang dibangun dalam tulisan ini menggunakan studi kualitatif, yakni dengan mengumpulkan berbagai refrensi ilmiah dan dari sumber primer dan sekunder melalui penelusuran tulisan terkait buku, jurnal, *paper*, surat kabar, majalah dan hasil wawancara langsung dengan informan yang ada hubungannya dengan masalah dalam kajian ini. Tulisan ini merupakan sebuah kajian untuk memahami tentang bentuk faksionalisasi dan Konflik Internal Partai Persatuan Pembangunan dalam persepsi masyarakat atas eksistensi partai politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faksionalisasi dan Konflik Internal di Era Orde Baru

Pasca jatuhnya rezim orde lama, maka kelahiran orde baru disambut dengan penuh harapan oleh kalangan umat Islam, umat Islam berharap kekuatan Islam kembali kepengung politik nasional. Dalam konteks kalangan, kalangan Islam modernis ada keinginan untuk merehabilitasi Masyumi, yang pada demokrasi terpimpin dibubarkan oleh Soekarno. Dalam rangka itu, kemudian pada tanggal 16 Desember 1965 dibentuk Badan Koordinasi Muslimin (BKM) yang terdiri dari 16 organisasi Islam. Maka mereka melakukan *lobbying* ke pemerintah dan mengeluarkan pernyataan tentang perlunya rehabilitasi Masyumi. Tentunya keinginan untuk melakukan rehabilitasi Masyumi mendapat pelarangan dari pemerintah. Hal ini tentu mengecewakan kalangan Islam, terutama kalangan Islam Modernis. Dengan adanya pelarangan tersebut, para pemrakarsanya lalu berusaha membentuk partai politik Islam lainnya, maka terbentuklah Partai Muslimin Indonesia (Parmusi).

Pemerintah mengizinkan berdirinya Parmusi tersebut. Hal ini karena pemerintah melihat bahwa partai-partai Islam yang ada (NU, PSII, dan Perti) belum mewadahi kalangan modernis, karena NU dan Perti berorientasi tradisional dan PSII meskipun berorientasi modernis tetapi kurang dikenal. Dengan berdirinya sejumlah partai-partai Islam tersebut, dan dalam sejumlah kebijaksanaan politik, pemerintah orde baru melakukan reorganisasi dan refungsionalisasi, baik pada tingkat suprastruktur politik maupun infrastruktur politik. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai Trilogi Pembangunan, usaha untuk menciptakan stabilitas politik sebagai landasan terlaksananya pembangunan ekonomi. Bagi orde baru, stabilitas politik merupakan prasyarat terlaksananya pembangunan. Pembangunan bisa dilaksanakan, menurut Orde Baru, apabila adanya stabilitas politik (Chamsyah, 2020).

Sehubungan dengan itu, maka langkah yang dilakukan orde baru adalah penyederhanaan (*fusi*) partai politik, sehingga Partai Persatuan Pembangunan lahir. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah partai politik Islam di Indonesia, partai ini dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973 di Jakarta. PPP merupakan hasil gabungan (*fusi*) dari empat partai politik Islam warisan pemerintah orde lama: Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Tarbiyah Indonesia (Perti), dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi).

Diawal fusi yang idealnya memiliki makna peleburan tuntas, tanpa mempersoalkan unsur, dalam realitas politiknya masih mengidentifikasikan diri dalam unsur asal, termasuk pertentangan tokoh baik mengidentifikasikan diri sebagai unsur tradisional maupun moderen. Ini dapat dilihat dari pertentangan antara tokoh NU yang mayoritas berada di Majelis Syuro, sementara tokoh Parmusi (setelah fusi berubah menjadi MI) duduk dikursi eksekutif. Namun,

dalam perkembangannya terjadi rivalitas dalam internal dan terkait dengan pucuk pimpinan partai, yang mencapai puncaknya pada era H.J. Naro, yang menyingkirkan banyak tokoh NU dari jajaran pengurus partai. Sehingga konflik antar faksi dan elit di internal PPP tetap berlangsung ditengah upaya dan rekayasa politik orba terhadap penyederhanaan parpol Islam itu sendiri. Bahwa karena didalamnya berkembang kelompok kepentingan karena faktor ideologi, faktor politis suatu organisasi, dan faktor sosial suatu organisasi. Ketika lahir pada masa orde baru, tak heran perpecahan dan konflik faksi elit di internal PPP sering terjadi. Padahal, sejatinya fusi ini diharapkan menjadikan partai Islam menjadi partai transideologi, yang terdiri dari sayap Islam modernis dan tradisionalis, dengan kebijakan ini fragmentasi tidak akan terjadi (Chamsyah, 2020).

Pasca fusi PPP yang didalamnya seluruh partai politik dengan latar belakang ideologi Islam, yaitu NU, PSII, Perti dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Sekali lagi, partai Islam menjadi partai transideologi, yang terdiri dari sayap Islam modernis dan tradisionalis. Dengan kebijakan ini, semestinya fragmentasi tidak akan terjadi. Meski demikian, PPP, khususnya menjelang pemilu 1970-an dan awal 1980-an, mengalami konflik internal berkepanjangan. Hal ini dipicu oleh persaingan antarunsur, khususnya unsur NU yang mewakili kelompok tradisionalis dan Parmusi yang mewakili kelompok modernis (Chamsyah, 2020).

Kedua unsur sama-sama ingin mengembangkan pengaruhnya dalam partai dan memperoleh semaksimal mungkin jabatan-jabatan strategis dan khususnya memperoleh lebih banyak kursi di parlemen. Walaupun NU adalah unsur terbesar di PPP, namun Parmusi dalam waktu cukup lama mampu memimpin partai dan membuat kondisi NU kurang berpengaruh. Setelah munculnya serangkaian kebijakan yang tidak adil, yang didukung oleh Parmusi, pada tahun 1982 NU memutuskan keluar dari PPP. Meski demikian, NU masih membolehkan anggotanya sebagai individu aktif dan berkiprah dalam PPP (Chamsyah, 2020).

PPP baru mengalami konflik internal yang serius ketika menjelang pemilu 1982, unsur NU dalam Fraksi Persatuan Pembangunan di DPR melakukan walk out pada sidang pengesahan UU Pemilu di DPR karena menolak materi RUU yang disetujui oleh unsur MI, SI dan Perti. Konflik internal PPP mencapai puncaknya ketika akhirnya kaum *nahdliyin* memutuskan keluar dari PPP dan kembali ke *khittah* 1926 melalui Muktamar NU di Situbondo, Jawa Timur pada tahun 1984 (Haris, 1991).

Konflik faksi NU dan MI merupakan sumber utama konflik elit PPP pada masa orde baru, bisa dikatakan sifatnya kelompok dalam unsur PPP. Konflik yang terjadi akibat perbedaan pendapat tentang jatah kursi atau representasi pencalonan dalam setiap pemilu yang ada, ataupun dalam memperebutkan kursi pimpinan PPP antar elit satu dan lainnya juga menjadi penyebab betapa PPP di masa orde baru tidak lepas dari konflik sehingga berdampak pada kondisi internal dan perolehan suara pada pemilu di masa orde baru. Dalam catatan (Haris

1991), setidaknya dalam PPP dimasa orde baru, konflik tersebut dapat dilihat dalam kolom peta konflik internal PPP pada Tabel 1.

Tabel 1. Peta Konflik Internal PPP Pada Era Orde Baru

Kasus	Pihak konflik	Materi Konflik
Pernyataan keprihatinan 50 tokoh masyarakat yang disampaikan di DPR (Petisi 50) pada tahun 1980	NU dan MI	Rahmat Muljomiseno dan Nuddin Lubis dari NU "mendukung dan dapat memahami" pernyataan 50 tokoh mengenai keprihatinan Mereka dengan pidato tanpa teks dari Presiden Soeharto di Ria dan Cijantung, Jakarta. Tentang tugas ABRI yang sangat penting masa orde baru, pihak MI yang disuarakan oleh Soedardji mengecam isi pernyataan tersebut.
Perebutan Kursi Ketua Komisi VII DPR pada 1980	NU dan MI	NU dan MI ingin menempati kursi Ketua Komisi VII. Sebelumnya pada 1979, MI minta kursi ketua Komisi VII dan bersedia melepas Kursi ketua Komisi VIII dan Wakil Ketua Komisi APBN yang dipegangnya. Permintaan ini dikabulkan dan disepakati untuk "dikembalikan" setahun berikutnya.
Pengajuan DCS PPP untuk Pemilu 1982	NU dan MI	Ketua Umum PPP, J. Naro, mengajukan DCS PPP untuk Pemilu 1982 tanpa sepengetahuan orang DPP yang lain, terutama kalangan NU.

Sumber: Data diolah 2020

Kepemimpinan J. Naro yang cenderung akomodatif terhadap kekuasaan Orde Baru, menjadi salah satu faktor penting dibalik konflik internal PPP selain campur tangan pemerintah dalam melembagakan konflik, sehingga pamor partai Islam ini pun berangsur-angsur merosot. Selain itu, sesungguhnya fusi dan intervensi pemerintah dalam konflik PPP, agar rezim Orde Baru ini dapat mengontrol dengan mudah situasi politik di dalam partai-partai tersebut (PPP dan PDI, Golkar) (Tebba, 2001).

Munculnya faksionalisasi dan konflik internal partai politik salah satunya didorong oleh keberadaan ideologi. Perselisihan antara dua ideologi yang berbeda dalam satu partai dan perselisihan yang terkait dengan perbedaan pemahaman dan penafsiran ideologi. Nantinya akan menimbulkan adanya perbedaan dalam pemahaman ideologi dan kehadiran konflik personal di antara elit adalah akar-akar utama perpecahan partai. Persoalan ini tidak akan terselesaikan ketika masalah yang dianggap fundamental ini tidak tertangani. (Noor 2012).

Tidak semua faksionalisasi yang berkembang di internal partai politik bertransformasi serta bermuara pada konflik internal. Sebagian faksionalisasi partai tersebut tetap melekat sebagai bagian dari dinamika internal dan saling pengaruh di antara para tokoh yang mencoba menjadi patron bagi sekelompok elit partai dengan latar belakang politik, ideologi, dan kultural yang sama.

Sebagian faksionalisasi lainnya berkembang menjadi konflik internal karena sulitnya mencari titik temu dan konsensus di antara faksi atau kubu yang berbeda prinsip serta

kepentingan dalam menyingkapi suatu kebijakan atau isu politik tertentu. Dampak langsung dari fenomena faksionalisasi yang bertransformasi menjadi konflik internal partai adalah kemerosotan elektoral sebagai akibat menurunnya kepercayaan publik, kendati tingkat pengaruhnya terhadap setiap parpol berbeda dengan satu sama lain.

Arah Politik dan Pragmatisme Partai Pasca Reformasi

Pada pemilu tahun 2014, tepatnya pada tanggal 24 Maret 2014. Ketua Umum PPP Suryadharma Ali hadir pada kampanye hari terakhir Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Kehadiran SDA bersama K.H. Nur Iskandar dan Djan Faridz dianggap tidak lazim dan menyalahi etika karena ketiga tokoh tersebut merupakan tokoh penting sebuah partai besar yang hadir di kampanye partai lain yang notabene adalah salah satu kompetitor dalam pemilu merebut suara rakyat. Ach. Baidowi mengatakan bahwa, pada saat itu semua pengurus partai sedang menggerakkan seluruh daya pikiran, upaya dan tenaganya untuk merebut hati rakyat agar memilih partainya, bukan mendukung partai lain yang sedang melakukan upaya serupa. Belum pernah ditemukan di belahan dunia manapun, seorang politisi berkampanye di hadapan parpol pesaing (Baidowi, 2020).

Kehadiran SDA pada acara kampanye Partai Gerindra menyisakan masalah. Selain, kehadiran Ketua Umum PPP yang menjadi masalah utama, hal tersebut juga melebar menjadi perseteruan di tubuh PPP manakala SDA, dalam acara tersebut, juga menyatakan dukungan kepada Prabowo sebagai Capres dalam Pilpres 2014. Deklarasi dukunga SDA atas nama partai merupakan sebuah pelanggaran atas mekanisme proses pengambilan keputusan yang seharusnya dilakukan secara musyawarah. Sebelum kedatangan SDA tersebut, pada Mukernas II PPP di Bandung, Februari 2014, tidak ada nama Prabowo dalam daftar nama pertimbangan untuk dicalonkan oleh PPP pada Pilpres 2014. Tujuh nama yang sempat muncul dalam Mukernas itu adalah Suryadharma Ali, Jusuf Kalla, Joko Widodo, Isran Noor, Din Syamsuddin, Jimly Asshiddiqie, dan Khofifah Indar Parawansa (Baidowi 2020).

Pasca kehadiran SDA pada kampanye Partai Gerindra, menjadikan suatu kekisruhan yang menyebabkan timbulnya mosi tidak percaya dari berbagai elemen PPP, baik tingkat DPP maupun DPW. Sikap mosi tidak percaya datang dari Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi, yang telah diikuti oleh 26 perwakilan DPW PPP dengan menggelar konferensi pers soal mosi tidak percaya kepada SDA selaku Ketua Umum. Mereka ingin SDA selaku Ketua Umum bertindak sesuai dengan koridor organisasi yang ada. Mosi tidak percaya ditanggapi SDA dengan keras, SDA melakukan berbagai pemecatan yang dimulai dengan pemecatan Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa yang posisinya kemudian digantikan dengan Djan Faridz (Baidowi 2020).

Setelah melakukan pemecatan terhadap Suharso Monoarfa, pada tanggal 18 April 2014. Tanpa melalui rapat Pengurus Harian DPP, SDA kembali melakukan pemecatan terhadap Romahurmuziy sebagai Sekjen DPP PPP dan menggantikannya dengan Isa

Muchsin. Hal ini semakin menambah runcing perpecahan dalam tubuh PPP. Pengurus Harian DPP PPP menggelar rapat kuorum di kantor DPP PP yang di pimpin oleh Wakil Ketua Umum Emron Pangkapi. Pada rapat tersebut diputuskan pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 1 pada 19-20 April 2014. Dalam Rapimnas tersebut keluar keputusan pemberhentian sementara terhadap Ketua Umum SDA dan mengangkat kembali Wakil Ketua Umum Emron Pangkapi sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum (Plt).

Adapun Rapat Pengurus Harian pada 18 April 2014 tersebut melahirkan 11 butir keputusan sebagai berikut:

1. Bahwa kehadiran dan orasi politik Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali dalam kampanye terbuka 23 Maret 2014 di SUGBK adalah langkah politik yang salah, melanggar etika/fatsoen politik, yang mempertontonkan perilaku politik yang *over acting* dan menjatuhkan moral kader partai di semua tingkatan, merupakan perbuatan yang melanggar konstitusi (AD/ART) partai, menjatuhkan nama PPP, melanggar keputusan Mukernas II PPP dan surat instruksi DPP PPP No.1109/2013 tentang Instruksi Harian Pemenangan Pemilu.
2. Bahwa sampai saat ini, PPP belum menentukan koalisi kepada partai dan capres mana pun, mengingat sesuai amanat Mukernas II di Bandung, PPP akan menentukan arah koalisi pencapresan pada Rapimnas yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Dengan demikian pernyataan dukungan yang disampaikan oleh ketua umum PPP Suryadharma Ali kepada Prabowo Subianto pada Hari jumat 18 April 2014 bertentangan dengan AD/ART partai dengan demikian batal demi hukum.
3. Menetapkan penyelenggaraan Rapimnas PPP pada Sabtu (19/4/2014) dengan dihadiri oleh pengurus harian DPP PPP, Ketua DPW PPP se-Indonesia, Ketua Majelis DPP PPP dan Ketua Mahkamah Partai sebagaimana amanat Mukernas II PPP di Bandung pada 7-9 Februari 2014.
4. Mengamanatkan kepada Majelis Musyawarah DPP PPP sesuai dengan ketentuan pasal 56 ART PPP secara bersama-sama sebagai satu-satunya pintu komunikasi politik PPP kepada partai-partai dan bakal capres/cawapres dalam rangka membangun koalisi pencapresan.
5. Menyatakan bahwa seluruh surat keputusan yang beredar terkait pemberhentian keanggotaan dan jabatan Suharso Monoarfa, Fadly Nurzal, Rahmat Yasin, Musyaffa Noer, Amir Uskara, dan Awaluddin TIDAK PERNAH ADA karena bertentangan dengan ketentuan konstitusi (AD/ART) PPP, tidak pernah teradministrasi di kesekjenan DPP PPP, bertentangan dengan semangat islah yang diputuskan oleh rapat PH Majelis Syariah DPP PPP pada 12 April 2014 di

- Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Dengan demikian nama-nama sebagaimana tersebut di atas tetap menduduki posisi dan jabatannya.
6. Menyatakan bahwa pengangkatan saudara Djan Faridz sebagai wakil ketua umum DPP PPP tidak pernah ada karena bertentangan dengan ketentuan konstitusi (AD/ART) PPP khususnya pasal 12 ART PPP
 7. Menyatakan bahwa reposisi Sekretaris Jenderal DPP PPP HM Romahurmuziy sebagaimana beredar dan disampaikan di media massa tidak pernah ada mengingat proses pengambilan keputusan yang dilakukan bertentangan dengan konstitusi (AD/ART) partai.
 8. Memberikan peringatan keras pertama kepada saudara Djan Faridz sebagai anggota PPP agar tidak lagi bertindak merongrong kewibawaan partai dan tidak boleh lagi membangun komunikasi politik atas nama PPP dalam rangka pencapresan.
 9. Memberikan peringatan pertama kepada saudara Syaifullah Tamliha untuk tidak lagi menyebarkan berita bohong mengatasnamakan DPP PPP.
 10. Memberikan peringatan pertama kepada K.H. Nur Muhammad Iskandar agar senantiasa bertindak sesuai dengan konstitusi (AD/ART) PPP dan keputusan partai yang diambil secara sah.
 11. Memberikan peringatan pertama kepada kepada Ketua Umum DPP PPP H. Suyadharma Ali agar tidak memosisikan dirinya di atas konstitusi (AD/ART) PPP, tetap berada pada jalur konstitusi (AD/ART) dan prinsip perjuangan partai, demi menjalankan keputusan partai yang diambil secara sah (Baidowi, 2019)

Kepemimpinan partai yang personal dan oligarkis ini ditandai dengan pengelolaan partai yang tidak hanya tak demokratis, tetapi juga diperlakukannya partai sebagai seolah milik pribadi, kelompok atau keluarga tertentu. Hal ini menjadikan partai hanya digunakan untuk kepentingan dan kebutuhan individu atau kelompok elit politisi tersebut. Padahal seharusnya partai politik adalah badan hukum publik yang bekerja semata-mata untuk kepentingan konstituennya secara luas.

Dominasi individu atau sekelompok elite di dalam partai ini diperburuk dengan sentralisasi struktur organisasi partai politik yang telah menjadi karakteristik partai di Indonesia pada umumnya. Sentralisasi struktur ini tergambar dari konstruksi Undang-Undang Partai yang memang memberikan wewenang sentral kepada pengurus partai politik untuk menentukan kebijakan partai. Tidak tersalurkannya ide, gagasan dan pandangan alternatif di dalam partai mengakibatkan faksi-faksi perlawanan yang berbeda pendapat pun terlahir. Mereka mampu mendorong terjadinya konflik di dalam partai, bahkan bukan tidak mungkin membelah diri dan mendirikan partai baru.

Perlunya kontinuitas organisasi yang tercemin dari strukturnya yang tidak sekedar mengandalkan kelangsungan organisasinya pada pemimpin partai, adanya struktur yang jelas sampai dengan tingkat daerah yang mempunyai mekanisme komunikasi dengan struktur di tingkat pusat merupakan satu aspek esensial dari sebuah partai politik. lalu adanya kesadaran diri pemimpin partai untuk menangkap peluang dalam keputusan politik dan berkoalisi, dan keinginan umum untuk memperoleh dukungan seluas-luasnya untuk memastikan aspirasi pemilihnya tersalurkan dengan lebih baik (Budiatri 2018).

Pengaruh Koalisi dan Sistem Kepartaian

Koalisi partai yang relatif bersifat cair turut memfasilitasi konflik di dalam partai dibandingkan memberikan insentif bagi kohesi dan konsolidasi partai politik. Dalam skema sistem demokrasi presidensial dengan basis multipartai, koalisi menjadi hal yang tak terhindarkan. Menjelang pemilihan presiden, partai umumnya perlu membangun koalisi untuk dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Seperti yang tergambarkan pada situasi rapat internal PPP, gesekan internal PPP kembali terjadi, Irgan Chairul Mahfiz menyebutkan, terdapat bahasan untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden. Pendapat itu di bantah oleh peserta lainnya karena dianggap terlalu dini untuk menentukan pilihan Calon Presiden. Dukungan terhadap Prabowo dianggap sebagai momentum politik yang harus disegerakan serta telah menjadi hutang politik PPP pada dukungan Prabowo di Pilpres sebelumnya (Mahfiz 2020).

Pada Mukernas II PPP memberikan mandat kepada Majelis Musyawarah Partai DPP PPP untuk melakukan pendekatan politik kepada tokoh eksternal, pada saat itu Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin yang saat itu juga menjabat sebagai wakil Ketua MPR RI melakukan pendekatan dengan partai PDIP untuk menjajaki kemungkinan duet Joko Widodo dengan Suryadharma Ali. Namun, tampaknya PDIP kurang meminati kemungkinan itu. Pada tanggal 12 Mei 2014 pada akhirnya PPP mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2014. Keputusan itu diambil dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II di Aston Epicentrum Jakarta. Keputusan ini melibatkan 33 Dewan Pimpinan Wilayah PPP seluruh Indonesia (Baidowi 2020)

Mendekati pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, koalisi dibentuk oleh Presiden terpilih untuk mendapatkan dukungan dari partai-partai yang menduduki parlemen, agar pemerintahan yang kemudian dijalankan berjalan stabil, tanpa gangguan berarti dari parlemen. Pendekatan koalisi yang dibangun pemerintah pada akhirnya menyebabkan kekisruhan di internal PPP menghangat kembali karena pilihan apakah tetap berada pada Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai oposisi atau berpindah haluan bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), yang mendukung pemerintah. Dukungan untuk berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) disampaikan juga oleh Hamzah Haz, selaku

Mantan Ketua Umum periode sebelumnya. Hamzah juga meminta, kepada seluruh kader PPP untuk membahas koalisi dalam pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla. Berbeda dengan Wakil Ketua Umum PPP, Achmad Dimiyati Natakusumah mengingatkan jajaran pengurus dan kader partainya untuk tidak mengkhianati koalisi permanen bersama Prabowo Subianto. Mereka yang nekat ingin mendukung Joko Widodo diminta mengundurkan diri dari PPP (Budiatri, 2018).

Ketika terjadi pemilihan pimpinan DPR RI dan pimpinan MPR RI pada 7 Oktober 2014. Fraksi PPP yang saat itu meraih 39 kursi ditinggalkan oleh Koalisi Merah Putih dan memilih Partai Demokrat karena memiliki 61 kursi dan lebih besar dari fraksi PPP. Saat Koalisi Merah Putih menang mutlak dalam pemilihan Pimpinan DPR RI, Fraksi PPP dijanjikan mendapatkan kompensasi dalam formasi Pimpinan MPR RI. Namun hasilnya juga nihil, karena justru jabatan untuk PPP diserahkan kepada PKS. Menjelang detik-detik akhir pemilihan Pimpinan MPR RI pada malam 7 Oktober 2014, masih juga tidak ada kepastian bahwa Fraksi PPP akan mendapatkan formasi pimpinan MPR RI. Dengan pertimbangan rapat pleno Fraksi PPP dan sejalan dengan konsultasi yang dilakukan oleh Suharso Monoarfa dan Romahurmuziy dengan jajaran Pimpinan Parpol Koalisi Indonesia Hebat, akhirnya diputuskan PPP berpindah ke KIH dalam rencana Pemilihan MPR RI. Dengan perpindahan ini telah resmi pula PPP masuk pada koalisi pemerintahan (Baidowi 2020).

Kecenderungan konflik internal pada PPP ini bukan disebabkan karena perbedaan visi-misi, platform, dan ideologi partai, tetapi cenderung disebabkan oleh pragmatisme atas pilihan koalisi partai politik dalam mendukung calon presiden dan wakil presiden dan/atau pemerintahan. Ciri utama dari perpecahan parpol umumnya dimulai dengan konflik antar elit terkait dengan sikap mereka terhadap strategi dalam merebut kekuasaan (Noor 2016)

Perpecahan ini muncul diakibatkan terdapat dua Faksi di PPP, yakni faksi yang ingin tetap pada koalisi oposisi diluar pemerintahan, dan faksi yang ingin menjadi bagian didalam pemerintahan, yang pada akhirnya menimbulkan pembelahan PPP. Dinamika perpecahan semakin berkembang dan meluas ketika muncul Muktamar Surabaya secara aklamasi memilih Romahurmuziy sebagai ketua Umum, dan sementara Muktamar Jakarta menetapkan secara aklamasi juga Djan Faridz sebagai Ketua Umum. Kedua kepemimpinan dalam PPP ini memiliki sikap yang berbeda dalam berkoalisi; sehingga akhirnya membentuk Dua Kubu yaitu, Kubu Romahurmuziy yang mendukung pemerintah dan Kubu Djan Faridz yang beroposisi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa konflik internal PPP disebabkan faktor perbedaan pandangan elit parpol dalam menentukan koalisi mengusung capres. Hal tersebut terjadi pada PPP tahun 2014 ketika terjadi perbedaan pencapresan antara Suryadharma Ali dengan Romahurmuziy. Konflik kemudian berujung pada dualisme kepemimpinan kubu Suryadharma Ali dan Romahurmuziy. Faktor lain yang mendorong terjadinya konflik adalah perbedaan latar belakang kader yang ada di dalam parpol. seperti yang terjadi pada PPP yang terbentuk dari unsur fusi parpol Islam, meski dalam perkembangannya unsur parpol kembali menjadi ormas, dapat memunculkan konflik. Perseteruan antara kelompok NU dan MI atau Parmusi dalam PPP kerap terjadi. Sebagai contoh, konflik antara Suryadharma Ali unsur Nu dan Bachtiar Chamsyah dari Parmusi. Ketika orde baru konflik ini kerap terjadi.

Berdasarkan faktor lahirnya konflik internal di PPP, penulis kemudian membuat klasifikasi konflik yaitu: konflik yang lahir akibat adanya perbedaan kepentingan politik, dan konflik yang lahir akibat perbedaan latar belakang kader. Dalam konteks kepartaian hal ini sebetulnya lumrah adanya karena kecenderungan partai adalah faksi, bukan fusi. Konflik internal PPP akibat adanya faksi di dalamnya dan perebutan kekuasaan serta pengaruh yang dilakukan oleh elit. Keadaan ini menegaskan bahwa elit partai yang sering terlibat konflik terjadi karena perebutan kekuasaan. Terjadinya konflik adalah hal yang wajar dalam budaya organisasi. Tetapi menjadi tidak wajar karena konflik berkepanjangan dan tidak dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, manajemen konflik mutlak diperlukan sebuah parpol. Konflik internal juga terjadi karena disebabkan intervensi pihak luar. Sebagai contoh, campur tangan pemerintah membuktikan bahwa konflik tidak lahir dari dinamika internal parpol, melainkan ada peran pihak lain yang memanfaatkan kepentingan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Baidowi, Ach. 2019. *Musibah PARTAI KAKBAH*. 1st ed. edited by Islahuddin. Jakarta: Samudra Biru (anggota IKAPI).
- Baidowi, Achmad. 2020. "Wawancara Pada Tanggal 18 Juni 2020."
- Beller, D.C., & Belloni, F. P. 1978. *Factions Politics: Political Parties and Factionalism in Comparative Perspective*. edited by F. P. Belloni and D. C. Beller. Santa Barbara: Abc-Clio Inc; First Edition edition (August 1, 1978).
- Boucek, Françoise. 2012. *Factional Politics: How Dominant Parties Implode or Stabilize*. London: Palgrave Macmillan UK.
- Budiatr, Aisah Putri. 2018. *Faksi Dan Konflik Internal Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ceron, Andrea. 2016. *Leaders, Factions and the Game of Intra-Party Politics*. New York: Routledge.
- Chamsyah, Bachtiar. 2020. "Wawancara Pada Tanggal 27 Juni 2020."
- Haris, Syamsuddin. 1991. *PPP Dan Politik Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Harmel, Robert, and Alexander C. Tan. 2003. "Party Actors and Party Change: Does Factional Dominance Matter?," *European Journal of Political Research* 42:409–24.
- Heller, William B. 2008. *Legislative Organization, Party Factions, and Party Policy Position: Endogenous Adaptation to Exogenous Institutions*.
- Hine, David. 1982. *Factionalism in West European Parties: A Framework for Analysis*. Vol. 5.
- Mahfiz, Irgan Chairul. 2020. "Wawancara Pada Tanggal 25 Juni 2020."
- Noor, Firman. 2012. "Evaluasi Kondisi Kepartaian 14 Tahun Reformasi Dalam Perspektif Pelembagaan Sistem Kepartaian." *Jurnal Masyarakat Indonesia* 38.
- Noor, Firman. 2016. "Leadership and Ideological Bond: PPP and Internal Fragmentation in Indonesia." *Studia Islamika* 23(1):61–103.
- Nurdin, M. Amin. 2019. *Prahara Partai Islam: Komparasi Konflik Internal PPP Dan PKS*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Romli, Lili. 2017. "Koalisi Dan Konflik Internal Partai Politik Pada Era Reformasi." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 8(2):98.
- Rose, Richard. 1964. "Parties, Factions and Tendencies in Britain." *SAGE Journals* 12(1):33–46.
- Sartori, G. 1976. *Parties and Party System: A Frameworks for Analysis*. London and New York: Cambridge University Press.
- Sartori, G. 2008. "Parties and Party Systems, Dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik Oleh Miriam Budiardjo." Pp. 404–5 in. Gramedia Pustaka Utama.
- Tebba, Sudirman. 2001. *Islam Menuju Era Reformasi*. Jogjakarta: Tiara Wacana.
- Tomsa, Dirk. 2008. *Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in the PostSuharto Era*. London and New York: Routledge.
- Zariski, Raphael. 1960. "Party Factions and Comparative Politics: Some Preliminary Observations." *Midwest Journal of Political Science* 4(1):27.